

## **RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU (STUDI NAGARI KASANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**

**Putri Yanti<sup>1</sup>, Susi Fitria Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
E-mail: [jungputriyanti@gmail.com](mailto:jungputriyanti@gmail.com) [susifd@unp.ac.id](mailto:susifd@unp.ac.id)

Corresponding Author: Putri Yanti  
Email : [jungputriyanti@gmail.com](mailto:jungputriyanti@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Riset ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan dampaknya bagi program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Riset ini mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dan dampaknya bagi program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa faktor penyebab resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru khususnya di Nagari Kasang yaitu faktor ekonomi, faktor adat, faktor lingkungan dan faktor sosialisasi. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol akan berdampak pada program pemerintah terkait pembangunan tersebut. Dimana dalam penyelesaian jalan tol tersebut menjadi lambat dan tidak sesuai dengan target yang telah diperkirakan oleh pemerintah.

**Kata Kunci: Resistensi, Pembangunan, Jalan Tol**

### **ABSTRAK**

*This research examines the factors that cause community resistance to the construction of the Padang-Pekanbaru toll road and its impact on government programs and community welfare. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected by means of observation, interviews, and documentation studies. This research describes the factors that cause community resistance to the construction of the Padang-Pekanbaru Toll Road and its impact on government programs and community welfare. There are several factors that cause community resistance to the construction of the Padang Pekanbaru toll road, especially in Nagari Kasang, namely economic factors, customary factors, environmental factors and socialization factors. Community resistance to toll road construction will have an impact on government programs related to the development. Where the completion of the toll road is slow and does not match the target that has been estimated by the government.*

**Keywords: Resistance, Development, Toll Road**



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2007 terkait rencana pembangunan jangka Panjang nasional tahun 2005-2025 merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan meliputi kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi, dan memperhatikan terpenuhinya kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi (Barirotuttaqiyyah et al., 2020).

Salah satu infrastruktur fisik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat perekonomian adalah infrastruktur jaringan transportasi. Salah satu infrastruktur jaringan transportasi adalah jalan tol. Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2005 menjelaskan bahwa jalan tol merupakan jalan umum bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Peraturan pemerintah No.15 Tahun 2005 menjelaskan bahwa jalan tol bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya (Barirotuttaqiyyah et al., 2020).

Pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi 1. Pembangunan jalan tol tersebut bukan hanya untuk meningkatkan konektivitas orang, melainkan juga melancarkan distribusi barang. Dengan demikian harga produk dapat bersaing dengan negara lain. Selain itu pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dinyakini mendorong perkembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, waktu tempuh Padang-Pekanbaru yang tadinya memakan waktu hingga 9 jam bisa dipangkas menjadi 2,5 jam hingga 3 jam saja (Kompas:2018).

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru terdiri dari enam seksi yakni Padang-Sicicin, Sicicin-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Payakumbuh-Pakalan, Pangkalan-Bakinang dan akan berakhir di Bangkinang-Pekanbaru Untuk jalan tol seksi Padang-Sicicin, panjangnya mencapai 28 Kilometer (Ayu & Nora Eka Putri, 2020). Dalam pembangunan jalan tol seksi Padang-Sicicin ini ditemukan permasalahan dan pertanyaan bagi sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tol, khususnya pada ruas dari Nagari Kasang ke Sicicin memiliki jalur yang berbelok-belok. Sedangkan dari dokumen perencanaan awal pembangunan jalan tol akan dibangun lurus.

Penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan (Ari dan Niko, 2013) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan tol Pekanbaru-Dumai yang akan dibangun di perkebunan sawit dinilai merugikan masyarakat dari segi ekonomi. Hal ini hampir sama dengan Penelitian yang dilakukan (Faisal dan Andi, 2021) dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi Depok terjadi penolakan dari masyarakat karena juga dirasa menghilangkan mata pencaharian masyarakat. dan organisas masyarakat. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetya dan Subekti, 2022) dari hasil penelitian dapat

dilihat bahwa pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo di DIY mendapatkan penolakan dari masyarakat karena ganti rugi sangat rendah sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini hampir sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, 2019) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbangi Besar. Masyarakat menginginkan tanah sisa dari pembangunan jalan tol juga merugikan masyarakat dari segi ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Miftah dan Nora, 2020) dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan tol Padang-Sicincin terjadi penolakan dari masyarakat karena lahan yang digunakan merupakan tanah ulayat masyarakat. Hal ini hampir sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Raynolds, 2017) dari hasil penelitian menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol juga menggunakan tanah ulayat masyarakat sehingga terjadi penolakan dari masyarakat. Selanjutnya dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati dan Handoyo, 2014) dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembangunan jalan tol Sumo di Sidoarjo juga mendapat penolakan dari masyarakat karena menggunakan tanah ulayat masyarakat. Selain itu dalam Penelitian yang dilakukan oleh (Surono, 2016) dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pembangunan jalan tol di Kabupaten Kendal dalam kenyataannya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sangat kurang sehingga masyarakat menjadi kekurangan informasi. Hal ini hampir sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Ervan, 2017) dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto sosialisasinya juga dinilai sangat kurang. Permasalahan ialah warga tidak mengizinkan tanahnya untuk dibebaskan karena adanya ketidaksepakatan harga ganti rugi yang diberikan.

Nagari Kasang merupakan salah satu daerah yang dilalui oleh pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Dalam pembangunan jalan tol tersebut Nagari Kasang terdapat dalam ruas Padang-Sicincin atau seksi 1 dari pembangunan jalan tol. Sebanyak 109 bidang tanah masyarakat Nagari Kasang akan dilalui oleh proyek pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru. Kebanyakan dari tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyarakat Nagari Kasang. 26 hektar tanah dari luas tersebut merupakan tanah sawah produktif yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Kasang (JawaPos.com). Sehingga dalam pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan tanah sawah produktif yang menjadi sumber pencahariannya.

Pada tanggal 23 Januari 2019 puluhan masyarakat Nagari Kasang melakukan aksi demo menuntut ganti rugi lahan. Pengunjuk rasa menilai tidak ada kejelasan ganti rugi lahan tersebut. Selain itu harga ganti rugi yang ditawarkan sangat rendah dan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Harga jual beli tanah hanya ditawarkan seharga Rp 33 ribu-Rp 55 ribu permeter. Sehingga masyarakat Nagari Kasang tidak mau melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru (Kumparan.com).

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru menimbulkan penolakan dari masyarakat Nagari Kasang. Masyarakat Ngarai Kasang menilai bahwa tidak ada manfaatnya pembangunan jalan tol dan bahkan malah memiskinkan masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat Nagari Kasang akan kehilangan sekian ton hasil panennya. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa pemerintah tidak memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Terutama terkait permasalahan mengenai peralihan pekerjaan masyarakat dari Bertani.

Berdasarkan observasi awal Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru menimbulkan resistensi atau penolakan dari masyarakat Nagari Kasang. Berikut ini

gejala-gejala yang menunjukkan resistensi yang dilakukan masyarakat Nagari Kasang yaitu:

1. Masyarakat Nagari Kasang melakukan aksi demo di gedung Gubernur pada tanggal 23 Januari 2019. Dalam aksi demo tersebut Masyarakat Nagari Kasang menilai bahwa tidak ada manfaatnya pembangunan jalan tol dan bahkan malah memiskinkan masyarakat.
2. Terjadinya penghadangan proses pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang dilakukan masyarakat Nagari Kasang. Gejala tersebut terjadi pada saat pengukuran pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru.
3. Terjadinya perdebatan antar masyarakat yang melakukan resistensi. Ada Sebagian masyarakat setuju terhadap pembangunan jalan tol dan Sebagian lagi menolak pembangunan jalan tol.
4. Munculnya pembicaraan informal di warung-warung dan sekitar lokasi pembangunan jalan tol mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Sehingga Masyarakat Nagari Kasang menolak pembangunan jalan tol dan menilai bahwa pembangunan jalan tol tersebut tidak memberikan manfaat kepada masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang faktor-faktor penyebab resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol dan dampaknya terhadap program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di Nagari Kasang. Penelitian dilakukan di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman Kecamatan Batang Anai. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Dinas PUPR Padang Pariaman, Wali Nagari Kasang, Datuak suku, ketua pemuda dan masyarakat Nagari Kasang. Untuk memperoleh data yang cukup, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru**

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru menimbulkan resistensi atau penolakan dari Sebagian masyarakat Nagari Kasang. Penolakan tersebut tentunya di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dianggap merugikan masyarakat Nagari Kasang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Resistensi masyarakat Nagari Kasang terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yaitu:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Dalam pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, tentu akan membawa dampak positif. Seperti meningkatkan perekonomian masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan lain sebagainya. Tetapi, manfaat tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tol lebih berdampak negatif bagi perekonomian masyarakat. Karena pembangunan jalan tol akan menghilangkan mata pencaharian atau sumber pendapatan masyarakat sebagai petani dan buruh tani. selain itu pemerintah

juga tidak memberikan solusi terkait peralihan masyarakat yang kehilangan lahannya karena pembangunan jalan tol. Sehingga kedepannya masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Resistensi masyarakat Nagari Kasang terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru disebabkan karena yang pertama yaitu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru hampir semua lahan masyarakat yang digunakan untuk pembangunan tersebut merupakan lahan sawah dan perkebunan karet yang produktif. Masyarakat Nagari Kasang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil dari sawah dan perkebunan karet tersebut. Oleh sebab itu jika lahan tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pembangunan jalan tol tidak hanya berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat yang memiliki lahan yang terkena pembangunan jalan tol. Akan tetapi pembangunan jalan tol juga berdampak pada ekonomi para buruh tani Wanita yang bekerja di lahan yang terkena jalan tol tersebut. Mereka menilai bahwa pembangunan jalan tol tersebut akan mengurangi wilayah kerja dan pendapatan mereka. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lagi.

## **2. Faktor Adat**

Lahan masyarakat Nagari Kasang yang digunakan dalam pembangunan jalan Tol Padang Pekanbaru merupakan tanah ulayat dan termasuk pusako tinggi. Tanah tersebut diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Tanah ulayat tersebut merupakan milik suatu kaum dan hanya boleh diolah oleh kaum tersebut. Selain itu tanah tersebut hanya boleh dijual apabila benar-benar sangat diperlukan oleh anggota kaum tersebut. Berdasarkan adat Minangkabau tanah ulayat yang merupakan pusako tinggi hanya bisa dijual jika dengan alasan yaitu: mayik tabajua di tengah rumah, gadih gadang alun balaki, dan rumah gadang katirisan. Dalam penjualan pusako tinggi tersebut harus benar-benar dimusyawarahkan dan disetujui oleh anggota kaum. Ninik mamak, dan datuak dari suku tersebut. Oleh sebab itu pembangunan jalan tol tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat karena sangat merugikan dari segi adat yang ada di masyarakat Nagari Kasang.

Pembangunan jalan tol Padang-pekanbaru mendapatkan penolakan dari masyarakat karena dipengaruhi oleh faktor adat dan kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena jika masyarakat adat melepaskan tanahnya untuk pembangunan jalan tol maka mereka akan kehilangan tanah ulayat atau pusako tinggi dari kaumnya yang telah mereka olah secara turun temurun. Selain itu dalam kebudayaan adat Minangkabau masyarakat yang menjual tanah pusako sangat merasa malu. Jika tanah ulayat tersebut dilepaskan untuk pembangunan jalan tol maka tidak ada lagi kebanggaan lagi bagi kaum tersebut. Sehingga dalam pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru sangat merugikan menurut adat masyarakat Nagari Kasang.

## **3. Faktor Lingkungan**

Resistensi masyarakat terhadap Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tol tersebut akan membawa dampak negatif bagi lingkungan masyarakat Nagari Kasang. Pembangunan tersebut akan merusak jalan utama Nagari Kasang dan akan menghambat aliran irigasi sawah

masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena alat-alat berat yang akan masuk dalam pembangunan jalan tersebut. Sehingga pembangunan jalan tol akan merusak kondisi lingkungan Nagari Kasang.

#### **4. Faktor Sosialisasi**

Pada tahap pembangunan jalan tol harus ada sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena pembangunan jalan tol. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar pembangunan. Dalam suatu pembangunan masyarakat perlu dilibatkan pada proses pembangunan tersebut. Masyarakat akan dapat menilai pentingnya pembangunan tersebut jika dilakukan sosialisasi dengan baik serta melibatkan masyarakat. Sosialisasi sangat perlu dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat. Sehingga dengan adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam proses pembangunan maka masyarakat akan mendapatkan informasi mengenai pembangunan itu dan mendukung pembangunan tersebut.

### **B. Dampak Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol akan berdampak pada program pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berikut ini penjelasan dampak resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol:

#### **1. Dampak terhadap program pemerintah**

##### **a. Molornya Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan sangat berdampak pada keberhasilan program pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol. Pemerintah akan kesulitan untuk melaksanakan pembangunan jalan tol karena adanya resistensi dari masyarakat. Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam program pemerintah akan berjalan sangat lambat. Pembangunan yang akan dilakukan membutuhkan waktu yang sangat lama jika mendapatkan penolakan dari masyarakat. Bahkan program pemerintah mengenai pembangunan jalan tol akan terancam batal jika mendapatkan resistensi dari masyarakat tersebut.

#### **2. Dampak bagi Masyarakat**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru tidak hanya berdampak pada program pemerintah tetapi juga berdampak pada masyarakat sendiri. Pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan tersebut tidak akan bisa tercapai jika mendapatkan penolakan dari masyarakat. Dengan adanya resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol tersebut maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini dampak positif pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

##### **a. Mempercepat mobilitas sosial**

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dapat menghubungkan daerah Padang sampai Pekanbaru dengan waktu yang lebih cepat. Orang yang mau pergi ke Pekanbaru atau sebaliknya menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan adanya jalan tol tersebut mobilitas atau perpindahan suatu penduduk menjadi cepat dan lancar. Yang pada mulanya perjalanan dari

Padang ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke Padang memakan waktu 6 sampai 7 jam, dengan adanya jalan Tol Padang-Pekanbaru maka perjalanannya hanya menjadi 3 jam.

b. Proses perdagangan lebih cepat

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru dapat mempercepat proses perdagangan di kedua daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena antara Padang dan Pekanbaru saling mengirim kebutuhan pokok untuk dijual kepada masyarakat di daerahnya. Masyarakat dapat mendapat keuntungan yang lebih besar dalam menjual dagangannya karena adanya jalan tol tersebut. Sehingga dengan adanya pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru proses perdagangan menjadi lebih cepat dan menghasilkan kualitas yang bagus.

Selain berdampak positif pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru juga dinilai berdampak negatif bagi Sebagian masyarakat khususnya di Kasang. Berikut ini dampak negatif jalan tol menurut masyarakat:

c. Kurangnya manfaat pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dinilai kurang memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya di Nagari Kasang. Masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tol lebih bermanfaat di daerah yang sering macet seperti di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya. Sedangkan di daerah Padang sampai Pekanbaru jarang sekali macet. Oleh karena menurut pandangan masyarakat pembangunan jalan Tol dirasa tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

d. Menambah pengeluaran

Dalam menggunakan jalan Tol Padang-Pekanbaru masyarakat dimintai membayar jika menggunakan jalan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat menganggap bahwa jalan tol tidak menguntungkan dan menambah pengeluaran. Daripada membayar jalan tol tersebut masyarakat lebih memilih menggunakan jalan utama daripada menggunakan jalan tol. Sehingga masyarakat menilai bahwa pembangunan jalan tol malah menambah pengeluaran bukan menambah pemasukan masyarakat.

## PEMBAHASAN

Pada bagian ini penulis akan membuat hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah penelitian dan temuan penelitian yakni: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru khususnya di Nagari Kasang, (2) dampak resistensi masyarakat terhadap program pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan melalui wawancara, maka temuan penelitian akan dibahas lebih lanjut dalam uraian berikut ini:

### A. Faktor-faktor Terjadinya Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru

Faktor-faktor terjadinya resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru dapat di uraikan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan cara atau suatu usaha yang lebih dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu motif ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan pendapatan dan mata pencaharian (Hadi dan Putra, 2019). Pembangunan yang

dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pendapatan masyarakat akan meningkat jika pembangunan di daerahnya berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena pembangunan dapat membuka lapangan kerja baru. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk merubah kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tol tersebut dapat menghubungkan suatu daerah ke daerah lain dengan waktu yang lebih cepat. Akan tetapi pada kenyataannya manfaat tersebut tidak dirasakan langsung oleh Sebagian masyarakat Nagari Kasang. Masyarakat memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru. Dalam perhitungan tersebut, Sebagian masyarakat kerugian yang diakibatkan dalam pembangunan jalan tol lebih besar daripada keuntungannya. Sehingga pembangunan jalan tol dirasa lebih merugikan masyarakat daripada menguntungkan mereka.

Lahan masyarakat Nagari Kasang yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Sebagian besar merupakan sawah yang sangat produktif. Hasil panen dari lahan tersebut dapat menghasilkan 100 karung bahkan lebih di setiap kali panen. Hasil panen tersebut sangat cukup sekali bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru masyarakat Nagari Kasang bersikap resisten karena mereka takut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setelah lahan tersebut dilepaskan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika kehilangan lahan pertanian mereka. Selain itu pemerintah juga tidak memberikan peralihan lahan dan pertukaran pekerjaan masyarakat dari petani. Oleh karena itu masyarakat merasa sangat dirugikan dari pembangunan jalan tol tersebut.

Pembangunan jalan tol tidak hanya merugikan para pemilik lahan untuk pembangunan jalan tol. Para buruh tani juga dirugikan akibat dari pembangunan jalan tol. Hal ini disebabkan karena Sebagian lahan yang terkenal pembangunan jalan tol merupakan takok/wilayah kerja mereka. Para buruh tani kehilangan hampir Sebagian wilayah kerjanya akibat adanya pembangunan jalan tol. Akibatnya mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru yang dinilai merugikan masyarakat menimbulkan resistensi atau penolakan dari masyarakat di Nagari Kasang. Mereka menilai kerugian yang didapat lebih besar daripada keuntungannya karena lahan yang digunakan merupakan lahan sawah produktif. Masyarakat takut kehilangan mata pencahariannya dan mereka menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini hampir sama dengan penelitian (Miftah dan Nora, 2020) dari hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembangunan jalan tol Padang-Sicincin terjadi penolakan dari masyarakat. Masyarakat Sicincin menolak pembangunan jalan tol tersebut karena Lahan yang digunakan dalam pembangunan jalan tol tersebut adalah lahan sawah produktif. Jika lahan tersebut dilepaskan untuk pembangunan

jalan tol masyarakat akan kehilangan mata pencaharian atau sumber pendapatannya. Sehingga jika lahan tersebut dilepaskan untuk pembangunan jalan tol maka masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari karena pembangunan jalan tol tersebut.

## **2. Faktor Adat**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru juga disebabkan karena faktor adat. Dimana dalam pembangunan tersebut memakai tanah ulayat atau tanah pusako masyarakat. Dimana tanah pusako tersebut tidak mudah dijual atau dilepaskan untuk pembangunan. Masyarakat masih memegang teguh nilai dari tanah pusako tersebut. Hal ini hampir sama dengan penelitian (Hadi&Putra, 2019) dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga menggunakan tanah ulayat masyarakat. Pada pembangunan tersebut juga mendapatkan resistensi dari masyarakat karena masyarakat tidak mau melepaskan tanah ulayatnya untuk pembangunan tersebut. Masyarakat masih memegang teguh nilai adat yang terkandung pada tanah ulayat tersebut yang merupakan warisan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi kebanggaan kaumnya.

Masyarakat Nagari Kasang mempunyai suku bangsa Minangkabau. Masyarakat Nagari Kasang menganut dan masih memegang teguh nilai dan norma yang selama ini diwariskan secara turun-temurun, yaitu kepemilikan tanah yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh kaum. Tanah ulayat atau tanah pusako bagi masyarakat Nagari Kasang tidak boleh diperjual-belikan atau dimiliki secara pribadi. Tanah tersebut akan diwariskan ke generasi yang akan datang agar mereka olah bersama untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tanah ulayat pada Sebagian besar masyarakat Minangkabau hanya boleh digadaikan pada keadaan-keadaan tertentu, yaitu: (1) *gadih gadang indak balaki* (perawan tua yang belum bersuami), (2) *mayik tabujua di ateh rumah* (mayat terbujur di atas rumah), (3) *rumah gadang katirisan* (rumah gadang yang bocor atau rusak), dan (4) *mambakik batang tarandam* (membongkar kayu yang terendam atau merubah nasib kaum). Pada masyarakat Minangkabau tanah merupakan suatu symbol yang sangat penting sebagai institusi adat matrilineal (garis keturunan ibu) yang selama ini masih dipegang teguh oleh masyarakat. Masyarakat tetap menjunjung tinggi atauran adat bahwa tanah ulayat merupakan tanah milik bersama dan diwariskan turun-temurun serta tidak boleh diperjual belikan.

Lahan yang digunakan dalam Pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Sebagian besar merupakan tanah ulayat atau tanah pusako masyarakat Nagari Kasang. Tanah tersebut telah mereka wariskan dan mereka olah secara turun-temurun dari hasil manaruko yang dilakukan oleh orang tua mereka dahulu. Masyarakat Nagari Kasang bersikap resisten karena mereka memegang teguh dan mempertahankan tanah tersebut sebagai symbol dan kebanggaan dari kaumnya. Masyarakat tidak mau melepaskan tanah tersebut untuk pembangunan jalan tol karena tanah tersebut akan diwariskan ke generasi berikutnya. Sehingga generasi yang akan datang juga bisa melestarikan dan mengolah tanah tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh orang tua mereka sebelumnya.

## **3. Faktor lingkungan**

Pembangunan jalan tol tentunya akan berdampak pada kondisi lingkungan masyarakat yang terkena pembangunan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut dapat berdampak negatif yang merugikan masyarakat juga dapat berdampak positif yang menguntungkan bagi masyarakat. Akan tetapi pada umumnya pembangunan jalan tol berdampak negatif pada kondisi lingkungan. Hal ini terjadi karena adanya alat berat serta penebangan pohon untuk pembangunan jalan tol. Jalan tol berdampak pada kerusakan jalan dan kesejukan lingkungan.

Dalam pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru masyarakat Nagari Kasang menilai pembangunan tersebut akan berdampak negatif pada kondisi lingkungan. Pembangunan jalan tol akan merusak jalan utama Nagari Kasang dan akan menutup aliran air ke sawah masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena adanya alat berat yang masuk dan adanya penebangan pohon untuk pembangunan jalan tol. Masyarakat menilai bahwa perbaikan jalan utama Nagari Kasang lebih baik bagi lingkungan daripada pembangunan jalan tol yang merusak lingkungan masyarakat.

#### **4. Faktor Sosialisasi**

Menurut Charlotte Buhler (Normina,2014) sosialisasi merupakan suatu proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Dalam suatu pembangunan sosialisasi merupakan kewenangan pemerintah untuk menyebarluaskan informasi mengenai pembangunan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat memahami pentingnya suatu pembangunan dan mau ikut serta dalam pembangunan tersebut. Sosialisasi sangat penting dilakukan guna memperoleh dukungan masyarakat terhadap pembangunan yang akan dilakukan.

Dalam pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru pemerintah dinilai kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Nagari Kasang. Kurangnya sosialisasi dalam pembangunan tersebut menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya pembangunan jalan tol dan kegunaannya. Hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak mau ikut serta dalam pembangunan jalan tol. Selain itu akibat dari kurangnya sosialisasi dalam pembangunan tersebut menyebabkan sikap resisten masyarakat terhadap pembangunan jalan tol. Masyarakat menolak pembangunan jalan tol karena tidak dapat memahami pentingnya pembangunan jalan tol bagi kesejahteraan masyarakat.

Sosialisasi dalam pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru seharusnya digencarkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Nagari Kasang sesuai dengan keadaan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Hal tersebut dilakukan supaya tercipta sinkronisasi antara harapan dan realitas pada masyarakat. Seharusnya pemerintahlah yang menjadi saluran komunikasi yang akan menyampaikan informasi dan menjadi pusat komunikasi bagi masyarakat, tetapi proses ini tidak terlihat dalam rencana pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang. Masyarakat hanya mendengar informasi mulut ke mulut antar sesama mereka tanpa diketahui benar atau tidaknya informasi tersebut. Bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui informasi itu sama sekali.

## **B. Dampak Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol akan berdampak pada program pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Berikut ini merupakan dampak resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru:

### **1. Dampak Bagi Program Pemerintah**

#### **a. molornya penyelesaian pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru sangat berdampak pada program pemerintah. Dimana program pemerintah terkait pembangunan jalan tol tersebut menjadi terhambat karena resistensi dari masyarakat. Proses pengerjaan jalan to khususnya jalan Tol Padang-Pekanbaru menjadi lambat diselesaikan. Bahkan pembangunan jalan tol tersebut akan terancam batal karena adanya resistensi atau penolakan dari masyarakat dalam pembebasan lahan.

Proses pembangunan jalan tol ruas seksi 1 yaitu seksi Padang-Sicincin sudah dimulai sejak tahun 2018. Hingga saat sekarang ini pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih berjalan lamban. Selama 4 tahun proses pembebasan lahan hanya selesai dalam jumlah 77 persen. Akibatnya, pembangunan jalan tol belum berjalan seberapa dari total 36.15 kilometer yang harus dibangun, baru 10 persen yang terlaksana. Pembangunan jalan Tol Padang Pekanbaru dinilai berjalan sangat lambat dibandingkan dengan proyek jalan tol di Provinsi lain. proyek pembangunan jalan tol tersebut sampai saat ini masih amat jauh dari kata selesai bahkan pembangunan jalan tol seperempatnya saja belum terbangun.

Permasalahan ini sama dengan penelitian (Mulyadi, 2021) dimana dalam hasil penelitiannya proyek pembangunan jalan Tol Cisumdawu juga berjalan lamban karena terkendala dalam proses pembebasan lahan. Pada proses pembangunan jalan tol tersebut menjadi lamban karena adanya penolakan dari masyarakat terkait pembebasan lahan. Banyak masyarakat yang menolak lahannya digunakan untuk pembangunan jalan tol tersebut. Akibatnya program pemerintah terkait pembangunan tersebut menjadi terhambat dan berjalan lambat. Pemerintah memprediksi pembangunan jalan tol fase 1 seksi 2-3 baru beroperasi pada April 2019 namun berbagai kendala dan persoalan terkait pembebasan lahan maka penyelesaiannya sampai pada bulan Agustus 2020.

Permasalahan penolakan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol memerlukan solusi penyelesaian dari pemerintah daerah. Pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang disampaikan melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk mengatasi terjadinya ketidaktahuan masyarakat pemilik tanah tentang fungsi sosial pembangunan yang dilakukan. Hal ii disebabkan karena penolakan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol sering terjadi karena kurangnya pendekatan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat kekurangan informasi tentang fungsi dan tujuan pembangunan jalan tol tersebut. Sehingga masyarakat menjadi menolak pembangunan jalan tol itu

karena tidak ada pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya pembangunan jalan tol bagi kesejahteraan masyarakat.

## **2. Dampak bagi Masyarakat**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol tidak hanya berdampak bagi pemerintah tetapi juga berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tol dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pembangunan jalan tol dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat menghubungkan suatu daerah ke daerah lainnya dengan waktu yang singkat. Masyarakat akan lebih mudah untuk mengirim atau menjual barang dan kebutuhan pokok ke daerah dengan adanya pembangunan jalan tol. Akan tetapi dengan adanya resistensi dari masyarakat terhadap pembangunan jalan tol maka tujuan dari pembangunan tersebut tidak dapat tercapai.

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol juga berdampak pada para pekerja proyek pembangunan jalan tol. Para pekerja proyek pembangunan jalan tol tidak mendapat gaji karena terhambat oleh penolakan masyarakat. Para pekerja tersebut tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena adanya penolakan dari masyarakat tersebut. Mereka tidak mendapatkan gaji sesuai kontraknya dan mereka menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru sangat berdampak pada para pekerja proyek tersebut dan membuat mereka menjadi sulit memperoleh gaji mereka.

Permasalahan tersebut sama halnya dengan penelitian (Sudirman, 2014) dimana dalam penelitiannya pembangunan jalan Tol Trans Jawa juga mengalami keterlambatan karena adanya penolakan masyarakat dalam pembebasan lahan. Penolakan dari masyarakat tersebut akan berdampak pada kepentingan umum atau seluruh masyarakat. Masyarakat yang menolak lahannya terkena pembangunan jalan tol dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan tol dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat bukan saja pemilik lahan. Sehingga adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan jalan tol tersebut membuat seluruh masyarakat akan menjadi rugi.

## **SIMPULAN**

Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini:

1. Faktor ekonomi, pembangunan jalan tol merugikan masyarakat dari segi ekonomi. Tidak hanya masyarakat pemilik lahan yang dirugikan tetapi para buruh tani juga dirugikan dari pembangunan jalan tol tersebut. Mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena kehilangan mata pencahariannya.
2. Faktor adat, Sebagian tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol merupakan tanah ulayat. Masyarakat bersikap resisten karena tanah tersebut tidak boleh dijual dan menjadi kebagaan atau lambang dari kaumnya. Jika tanah itu

dilepaskan untuk pembangunan jalan tol maka mereka akan kehilangan kebanggaan kaumnya dan tidak bisa lagi diwariskan ke anak cucu mereka.

3. Faktor lingkungan, masyarakat Nagari Kasang menilai pembangunan jalan tol akan berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat. Pembangunan tersebut akan merusak jalan utama mereka dan akan menutup saluran air ke sawah mereka.
4. Sosialisasi, resistensi masyarakat dalam pembangunan jalan tol disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa tanahnya akan digunakan untuk pembangunan jalan tol. Pemerintah dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan jalan tol tersebut.

Dampak Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru khususnya di Nagari Kasang yaitu :

1. Dampak terhadap program pemerintah, Resistensi masyarakat terhadap pembangunan sangat berdampak pada keberhasilan program pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan jalan tol. Pemerintah akan kesulitan untuk melaksanakan pembangunan jalan tol karena adanya resistensi dari masyarakat.
2. Resistensi masyarakat terhadap pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru tidak hanya berdampak pada program pemerintah tetapi juga berdampak pada masyarakat sendiri. Pembangunan jalan tol bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan tersebut tidak akan bisa tercapai jika mendapatkan penolakan dari masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 5. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Adenugroho, T., & Pontan, D. (2021). *Identification of Dominant Factors Affecting the Successful Development of Highway Construction Projects*. 537–544.
- Adnani, K. (2016). Resistensi Perempuan Terhadap Tradisi-Tradisi Di Pesantren Analisis Wacana Kritis Terhadap Novel Perempuan Berkalung Sorban. *Jurnal Kawistara*, 6(2), 144–156.
- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(2), 151–168. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v4i2.682>
- Ayu, W. P. A., & Nora Eka Putri. (2020). Implementasi Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Sicincin dari Aspek Pengadaan Tanah. *Jurnal Niara*, 13(2), 23–28. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4502>
- Barirotuttaqiyyah, D., Muta'ali, L., & Kurniawan, A. (2020). Variasi Spasial Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Desa Koripan, Kec. Susukan, Kab. Semarang. *Jurnal Widya Laksana*, 9(1), 11–18.
- Effendi, A. (2014). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Salingkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 2580–2593.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- NSS, R. L. P., Suryawardana, E., & Triyani, D. (2015). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota

- Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 82.  
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v17i1.505>
- Poerwati, T., & Hamidah Imaduddina, A. (2019). Keberhasilan Pembangunan Desa Ditinjau Dari Bentuk Partisipasi Masyarakat Melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 3(02), 103–114.  
<https://doi.org/10.36040/pawon.v3i02.893>
- Revayanti, I. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Bocimi Terhadap Sosial , Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sukabumi. *Geoplanart*, 2(2), 76–88.
- Rezky Kinanda, A. A. ., (2019). Kajian Literatur Resistensi Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Serta Usulan Strategi Dalam Menghadapi Resistensi Kebijakan Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5(3), 187. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v5i3.138>
- Savonda Rizky Komorina. (2017). Resistensi Masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Kecamatan Gunung Anyar Surabaya. *Artikel*, 05(01), 1–6.
- Siswanto, V. A., Wahjuningsih, T. P., & Murtini, M. (2019). Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pada Usaha Batik Dan Perhotelan Di Kota Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 17, 83–92.  
<https://doi.org/10.54911/litbang.v17i0.110>
- Urrahmi, M., & Putri, N. E. (2020). Manajemen Konflik Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 9–17. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.119>
- Wahyuni. (2018). Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resistensi Dalam Masyarakat. *Peurawi*, 1(1), 1–14. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi>
- Wijaya, I. S. (2015). Perencanaan dan Strategi komunikasi dalam kegiatan pembangunan. *Jurnal Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*, XVIII(1), 53–61.  
[https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera\\_journal/article/view/428](https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera_journal/article/view/428)
- Yonatan, Fitriyah, N., & Margono, A. (2014). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. *E-Journal Administrative Reform*, 2(4), 2620–2632.